



RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah gambaran visi dan misi kepala daerah yang terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi renja tahun sebelumnya.

Sebagai Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023;
- c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Secara umum, fungsi Renja Perangkat Daerah untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana bentuk pelayanan Perangkat Daerah akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah-langkah atau tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan Perangkat daerah agar program berjalan secara efektif.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari substansi yang terkandung dalam Renstra, kedalam kegiatan yang bersifat operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM, waktu dan anggaran agar dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi sebagai salah satu alat ukur dalam pencapaian kinerja organisasi. Target-target yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022 akan menjadi bahan dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada Renstra dan RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tersedianya dasar dalam menyusun RKA_SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan Kegiatan Pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku pimpinan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan Tinggi maupun dari Perangkat daerah kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat Daerah Provinsi dari Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

- a.) Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

b.) Menjelaskan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam PMDN No. 17 Tahun 2021 sesuai dengan masing-masing perangkat daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Menjelaskan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaannya);

4.2 Menjelaskan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

5.1 Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.2 Menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan.

5.3 Menjelaskan Rencana Tindak Lanjut (mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tandatangan kepala perangkat daerah serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan).

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan misi ke-4 RPJMD yakni ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”***

Adapun fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya, c) Pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati, d) Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu, e) Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, f) Penyusunan laporan hasil pengawasan, g) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten; dan h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2022 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Selain itu juga dapat diketahui masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya secara langsung sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023 dan 2024. Disamping itu memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada tahun anggaran 2022 Anggaran Urusan Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebesar Rp9.272.986.991,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 8.597.456.918,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 675.530.073,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Kabupaten Sampang

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	79,70%	89,85%	100%	279,70%	50
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	300%	50
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	42 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	17 dokumen	50

6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan triwulanan	36 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	10 laporan	50
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan LKPJ, LKJIP		0	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	4 laporan	50
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu		100%	100%	95,45%	97,73%	100%	295,25%	50
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN		10 dokumen	14 dokumen	12 dokumen	85,71%	6 laporan	28 laporan	50
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor	70 jenis	70 jenis	49 jenis	48 jenis	97,96%	70 jenis	188 jenis	50
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)		0	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	2 laporan	50
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran		1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	5 laporan	50

6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		100%	100%	89,33%	94,67%	100%	289,33%	50
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat teknis dan substansi dan penjenjangan auditor	50 orang	40 orang	45 orang	40 orang	88,89%	24 orang	104 orang	50
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK	45 orang	45 orang	30 orang	27 orang	90%	30 orang	102 orang	50
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	100%	96,24%	98,12%	100%	296,24%	50
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik		14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	10 jenis	38 jenis	50
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		27 jenis	27 jenis	27 jenis	100%	55 jenis	109 jenis	50
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		15 jenis	15 jenis	15 jenis	100%	200 kali	230 kali	50
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	0	10 jenis	50

6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu		180 kali	180 kali	171 kali	95%	40 kali	391 kali	50
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 kali	104 kali	25 kali	24 kali	96%	40 kali	168 kali	50
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	100%	66,67%	83,34%	100%	266,67%	50
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman		3 jenis	3 jenis	0	0%	20 buah	23 buah	50
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer		6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	10 buah	22 buah	50
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi		100%	100%	89,97%	94,99%	100%	289,97%	50
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	2500 surat	2347 surat	2500 surat	2250 surat	90%	2000 surat	6597 surat	50
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon		12 bulan	12 bulan	9 bulan	75%	12 bulan	33 bulan	50

6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa cleaning service		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	300%	50
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	30 unit	10 unit	1 paket	1 paket	100%	31 unit	3 paket	50
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	50
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	6 unit	14 unit	59 kali	59 kali	100%	1 paket	3 paket	50
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	100%	0%	0%	0	100%	50
6.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Promosi Perangkat Daerah		2 kali	2 kali	0%	0%	0	2 kali	50

6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu		100%	100%	82,27%	91,14%	100%	282,27%	50
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT		100%	100%	77,72%	88,86%	100%	277,72%	50
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		41 laporan	43 laporan	42 laporan	97,67%	35 laporan	118 laporan	50
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		21 laporan	21 laporan	19 laporan	90,47%	50 laporan	90 laporan	50
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		5 laporan	5 laporan	3 laporan	60%	3 laporan	11 laporan	50
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		7 laporan	7 laporan	5 laporan	71,43%	9 laporan	21 laporan	50
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		117 laporan	117 laporan	81 laporan	69,23%	84 laporan	282 laporan	50

6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100%	95%	90%	94,73%	98%	288%	50
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti		100%	100%	86,81%	93,41%	100%	286,81%	50
6.01.02.2.02.02	Penanganan Penyelesaian kerugian negara/Daerah							2 laporan	2 laporan	50
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		91 laporan	91 laporan	79 laporan	86,81%	95 laporan	265 laporan	50
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi		100%	100%	100%	100%	100%	300%	50
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun		5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi	100%	40 rekomendasi	50 rekomendasi	50

6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%	2 rekomendasi	6 rekomendasi	50
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		3 rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	4 laporan	10 laporan	50
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	300%	50
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		11 PD	11 PD	11 PD	100%	2 kali	33 PD	50
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		9 PD	39 PD	39 PD	100%	78 kali	87 PD	50

6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	5 laporan	13 kegiatan	50
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	75 nilai	72 nilai	25 PD	25 PD	100%	72 nilai	72 nilai	50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang adalah 89,85% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Penjelasan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebab jumlah laporan hasil audit yang terbit belum memenuhi target karena adanya refocusing anggaran akibat kondisi pandemic Covid-19 sehingga mengurangi jumlah obyek pemeriksaan ;
2. Sebab tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan belum memenuhi target karena terdapat temuan BPK yang membutuhkan waktu untuk dipenuhi dan banyak temuan terkait pihak ketiga (penyedia barang/jasa);
3. Sebab frekuensi koordinasi pengawasan yang dilaksanakan belum memenuhi target karena pelaksanaannya bergantung pada jumlah rapat koordinasi pengawasan baik tingkat pusat maupun Provinsi yang tidak tentu di setiap tahunnya;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang disajikan dalam tabel berikut :

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Tujuan:											
	Terwujudnya pengawasan internal yang efektif		Maturitas SPIP	n/a	Level 3 (nilai 3,00)	Level 3 (nilai 3,01)	Level 3 (nilai 3,02)	n/a	Level 3 (nilai 3,00)	Level 3 (nilai 3,01)	WTP	
	Sasaran:											
	Meningkatnya kapabilitas APIP		Level kapabilitas APIP menurut IACM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2+	Level 3	Level 3	Level 3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Inspektorat Daerah sebagai bidang pengawasan daerah memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan daerah.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal;
2. Koordinasi dalam hal pengendalian dan bidang pengawasan di masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) masih belum optimal;
3. SDM pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas;

Permasalahan dan hambatan dalam kegiatan pengawasan :

sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun bertujuan guna memberikan keyakinan memadai bagi SKPD atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, Ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

a. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

Output dari indikator ini adalah jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP yang disusun oleh SKPD berdasarkan hasil penyelenggaraan SPIP di wilayah masing-masing. Mulai pada tahun 2019, hanya 10 SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Sampang dari 42 SKPD yang telah menyusun RTP sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023 seluruh SKPD telah menyusun RTP.

b. Tingkat maturitas SPIP

Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang akan dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2021, level Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sampang pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,000 skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,700 dan skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,000.

Kendala utama dalam penyelenggaraan SPIP ini adalah :

1. Kondisi bahwa SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman pengendalian risiko internal SKPD, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal;
2. Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi.
3. Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar 84,20% yang berdampak kerugian daerah cukup material
4. Rata-rata pengelolaan aset belum tertib.

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu:

1. Belum dilaksanakannya kegiatan pemberian jasa pemberian saran (advisory service) secara optimal, berupa konseling, bimbingan teknis, asistensi, dan focus group discussion karena keterbatasan anggaran dan SDM. Selama ini yang telah dilaksanakan baru kegiatan konseling saja;
2. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi, padahal di masa mendatang Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kegiatan pengawasan, sehingga seluruh APIP diharapkan untuk dapat mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap penggunaan Teknologi Informasi;
3. APIP belum berperan aktif dalam memverifikasi dan menilai efektivitas metodologi dan proses Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh auditi, sehingga auditi belum memperoleh dampak yang optimal dari penyusunan dokumen Manajemen Risiko;
4. APIP belum sepenuhnya melakukan analisis dan evaluasi dengan mengidentifikasi informasi yang cukup andal, relevan dan berguna dalam mencapai tujuan penugasan yang diberikan.

Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

TABEL T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sampang

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0000)	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	6.923.473.913	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	6.923.473.913	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah	100%	1.727.563	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah	100%	1.727.563	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	5 dokumen	783.625	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	5 dokumen	783.625	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sampang	Laporan triwulanan	4 laporan	260.792	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sampang	Laporan triwulanan	4 laporan	260.792	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang	laporan LKPJ, LKJIP	2 dokumen	683.146	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang	laporan LKPJ, LKJIP	2 dokumen	683.146	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	4.488.545.117	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	4.488.545.117	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang	Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN	6 laporan	4.395.574.638	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang	Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN	6 laporan	4.395.574.638	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sampang	Jumlah Alat Tulis Kantor	70 jenis	92.448.895	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sampang	Jumlah Alat Tulis Kantor	70 jenis	92.448.895	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)	1 laporan	260.792	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)	1 laporan	260.792	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	260.792	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sampang	Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	260.792	

6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	688.401.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	688.401.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat teknis dan substansi dan penjenjangan auditor	24 orang	396.268.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat teknis dan substansi dan penjenjangan auditor	24 orang	396.268.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang	Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK	30 orang	292.133.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sampang	Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK	30 orang	292.133.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	522.544.360	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	522.544.360	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang	Jumlah alat listrik	10 jenis	14.490.130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang	Jumlah alat listrik	10 jenis	14.490.130	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	55 jenis	94.906.630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	55 jenis	94.906.630	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang	Jumlah Cetak dan Penggandaan	200 kali	89.147.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang	Jumlah Cetak dan Penggandaan	200 kali	89.147.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	Jumlah Kunjungan Tamu	40 kali	171.240.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	Jumlah Kunjungan Tamu	40 kali	171.240.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali	152.760.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali	152.760.600	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	518.530.073	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	518.530.073	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Sampang	Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman	20 buah	132.061.387	Pengadaan Mebel	Kab. Sampang	Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman	20 buah	132.061.387	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer	10 buah	386.468.686	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer	10 buah	386.468.686	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	294.545.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	294.545.800	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang	Jumlah surat terkirim	2000 surat	9.824.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang	Jumlah surat terkirim	2000 surat	9.824.800	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang	Jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon	12 bulan	69.471.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang	Jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon	12 bulan	69.471.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang	pembayaran jasa cleaning service	12 bulan	215.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang	pembayaran jasa cleaning service	12 bulan	215.250.000	

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah	100%	409.180.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah	100%	409.180.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang	jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	31 unit	71.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang	jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	31 unit	71.650.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1 paket	317.080.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1 paket	317.080.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 paket	20.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sampang	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 paket	20.450.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	1.051.530.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	1.051.530.500	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT	100%	777.810.500	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT	100%	777.810.500	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 laporan	103.825.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 laporan	103.825.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 laporan	259.260.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 laporan	259.260.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 laporan	24.775.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 laporan	24.775.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 laporan	47.087.500	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 laporan	47.087.500	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	84 laporan	222.120.000	Pengawasan Desa	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	84 laporan	222.120.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sampang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	98%	120.743.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Sampang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	98%	120.743.000	

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti	100%	273.720.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti	100%	273.720.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Sampang		2 laporan	25.600.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Sampang		2 laporan	25.600.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95 laporan	273.720.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sampang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95 laporan	273.720.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	100%	567.129.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	100%	567.129.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	40 rekomendasi	67.343.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	40 rekomendasi	67.343.500	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Sampang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	22.175.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Sampang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	22.175.500	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Sampang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 laporan	45.168.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Sampang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 laporan	45.168.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100%	499.785.500	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100%	499.785.500	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sampang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 kali	39.405.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sampang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 kali	39.405.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sampang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78 kali	128.101.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sampang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78 kali	128.101.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sampang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 laporan	321.804.500	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sampang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 laporan	321.804.500	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sampang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72 nilai	10.475.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sampang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72 nilai	10.475.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a.)Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 maka diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sampang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Prioritas 1	Pemantapan Pemulihan Ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,97
		Indeks Gini	Indeks	0,261
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,73
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	124,52
Prioritas 2	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia melalui pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	64,84
		Angka Kemiskinan	%	21,71
Prioritas 3	Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan public dan inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	64,01
Prioritas 4	Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	3,79

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023

Berdasar tabel diatas yang memuat empat prioritas pembangunan dengan sembilan indikator kinerja utama, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada **Prioritas Pembangunan Daerah Ketiga** RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu : **“Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah”** dengan target pada Tahun 2023 adalah 64,01.

b.) Target indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, aspek utama dalam kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk dalam Aspek Pelayanan Umum yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) berdasarkan PMDN No. 17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPDP Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2022
1	2	3	4	5
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
1	Tingkat Kapabilitas APIP Menurut IACM	Level	3	
2	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah sampai tingkat terdefinisi	%	51,3	

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

**Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2023
1	2	3		4
	Tujuan:			
1	Terwujudnya pengawasan internal yang efektif	1	Maturitas SPIP	3,01
	Sasaran:			
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	1	Level Kapabilitas APIP menurut IACM	Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan Inspektorat Daerah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Inspektorat Daerah mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan daerah, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Program Penelitian dan Pengembangan.

c.) Rumusan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Bahwa program/ kegiatan dan pagu indikatif pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan perumusan awal RKPD

d.) Tabel rencana Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Pada tahun 2023 telah dirumuskan perencanaan Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sampang

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi			6.923.473.913				7.269.647.609
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah			1.727.563				1.813.941
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	Kab. Sampang	100%	783.625	DAU		100%	822.806
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan triwulanan	Kab. Sampang	100%	260.792	DAU		100%	273.832
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan LKPJ, LKJIP	Kab. Sampang	100%	683.146	DAU		100%	717.303
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu			4.488.545.117				4.712.972.373
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN	Kab. Sampang	100%	4.395.574.638	DAU		100%	4.615.353.370
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kab. Sampang	100%	92.448.895	DAU		100%	97.071.340
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)	Kab. Sampang	100%	260.792	DAU		100%	273.832
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Sampang	100%	260.792	DAU		100%	273.832

6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			688.401.000				722.821.050
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat teknis dan substansi dan penjenjangan auditor	Kab. Sampang	100%	396.268.000	DAU		100%	416.081.400
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK	Kab. Sampang	100%	292.133.000	DAU		100%	306.739.650
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			522.544.360				548.671.578
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	Kab. Sampang	100%	14.490.130	DAU		100%	15.214.637
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sampang	100%	94.906.630	DAU		100%	99.651.962
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang	100%	89.147.000	DAU		100%	93.604.350
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kab. Sampang	100%	171.240.000	DAU		100%	179.802.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang	100%	152.760.600	DAU		100%	160.398.630
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			518.530.073				544.456.577
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman	Kab. Sampang	100%	132.061.387	DAU		100%	138.664.456
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer	Kab. Sampang	100%	386.468.686	DAU		100%	405.792.120

6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi			294.545.800				309.273.090
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Kab. Sampang	100%	9.824.800	DAU		100%	10.316.040
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon	Kab. Sampang	100%	69.471.000	DAU		100%	72.944.550
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa cleaning service	Kab. Sampang	100%	215.250.000	DAU		100%	226.012.500
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah			409.180.000				429.639.000
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Sampang	100%	71.650.000	DAU		100%	75.232.500
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	Kab. Sampang	100%	317.080.000	DAU		100%	332.934.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Sampang	100%	20.450.000	DAU		100%	21.472.500
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu			1.051.530.500				1.104.107.025
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko dan non PKPT			777.810.500				816.701.025
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	100%	103.825.000	DAU		100%	109.016.250
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sampang	100%	259.260.000	DAU		100%	272.223.000

6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Sampang	100%	24.775.000	DAU		100%	26.013.750
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Sampang	100%	47.087.500	DAU		100%	49.441.875
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Sampang	100%	222.120.000	DAU		100%	233.226.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Kab. Sampang	100%	120.743.000	DAU		100%	126.780.150
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti			273.720.000				287.406.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kab. Sampang	100%	25.600.000	DAU		100%	26.880.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sampang	100%	273.720.000	DAU		100%	287.406.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi			567.129.000				595.485.450
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			67.343.500				70.710.675
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Sampang	100%	22.175.500	DAU		100%	23.284.275
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Sampang	100%	45.168.000	DAU		100%	47.426.400

6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan			499.785.500				524.774.775
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sampang	100%	39.405.000	DAU		100%	41.375.250
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sampang	100%	128.101.000	DAU		100%	134.506.050
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sampang	100%	321.804.500	DAU		100%	337.894.725
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sampang	100%	10.475.000	DAU		100%	10.998.750

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Sampang yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sampang adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 terdapat 3 program dan 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun rencana kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten sampang dapat dijelaskan pada table Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Alokasi Dana	
					Hasil Program	Kegiatan		Pagu	Pagu	
						Keluaran	Hasil	Indikatif 2023	Maju 2024	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Sasaran 01		100	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%		6.923.473.913	7.269.647.609
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah	100%		1.727.563	1.813.941
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Sampang		Dokumen RKA, DPA, RENJA, RENSTRA, PKPT	5 dokumen	100%	783.625	822.806
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Sampang	-	Laporan triwulanan	4 laporan	- 100%	260.792	273.832
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Sampang		laporan LKPJ, LKJIP	2 dokumen	100%	683.146	717.303

6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%		4.488.545.117	4.712.972.373
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Sampang		Dokumen Gaji, Pajak, JKK, JKN, TPP dan Honorarium ASN	6 laporan		4.395.574.638	4.615.353.370
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Sampang		Jumlah Alat Tulis Kantor	70 jenis	100%	92.448.895	97.071.340
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Sampang		Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)	1 laporan		260.792	273.832
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Sampang		Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	100%	260.792	273.832
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%		688.401.000	722.821.050
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab. Sampang		Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat teknis dan substansi dan penjenjangan auditor	24 orang	100%	396.268.000	416.081.400
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sampang		Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK	30 orang	100%	292.133.000	306.739.650

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%			522.544.360	548.671.578
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sampang		Jumlah alat listrik	10 jenis			14.490.130	15.214.637
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sampang		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	55 jenis	100%		94.906.630	99.651.962
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Sampang		Jumlah Cetak dan Penggandaan	200 kali	100%		89.147.000	93.604.350
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sampang		Jumlah Kunjungan Tamu	40 kali			171.240.000	179.802.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sampang		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 kali			152.760.600	160.398.630
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%		518.530.073	544.456.577
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kab. Sampang		Jumlah pengadaan kursi, lemari dan papan pengumuman	20 buah	100%		132.061.387	138.664.456
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sampang		Jumlah pengadaan penghancur kertas, AC, Proyektor, Laptop dan Printer	10 buah			386.468.686	405.792.120

6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%			294.545.800	309.273.090
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sampang		Jumlah surat terkirim	2000 surat			9.824.800	10.316.040
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sampang		Jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon	12 bulan			69.471.000	72.944.550
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sampang		pembayaran jasa cleaning service	12 bulan			215.250.000	226.012.500
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemenuhan kebutuhan penunjang Inspektorat Daerah	100%			409.180.000	429.639.000
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sampang		jumlah pemeliharaan/ rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	31 unit			71.650.000	75.232.500
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sampang		Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1 paket			317.080.000	332.934.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Sampang		Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 paket	100%		20.450.000	21.472.500

6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		100%	1.051.530.500	1.104.107.025
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan	100%		100%	777.810.500	816.701.025
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kab. Sampang		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 laporan		100%	103.825.000	109.016.250
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Sampang		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 laporan			259.260.000	272.223.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			Kab. Sampang		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 laporan		100%	24.775.000	26.013.750
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			Kab. Sampang		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 laporan		100%	47.087.500	49.441.875
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa			Kab. Sampang		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	84 laporan			222.120.000	233.226.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kab. Sampang		Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	98%		100%	120.743.000	126.780.150

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang selesai dan ditindaklanjuti	100%		100%	273.720.000	287.406.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Kab. Sampang			2 laporan			25.600.000	26.880.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Kab. Sampang		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95 laporan			273.720.000	287.406.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%			567.129.000	595.485.450
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	40 rekomendasi			67.343.500	70.710.675
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Kab. Sampang		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi			22.175.500	23.284.275
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Kab. Sampang		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 laporan			45.168.000	47.426.400

6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100%			499.785.500	524.774.775
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Sampang		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 kali			39.405.000	41.375.250
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kab. Sampang		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78 kali	100%		128.101.000	134.506.050
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kab. Sampang		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 laporan			321.804.500	337.894.725
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kab. Sampang		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72 nilai	100%		10.475.000	10.998.750
JUMLAH PAGU										8.542.133.413	8.969.240.084

Dalam Renja ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang merencanakan 3 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 8.542.133.413,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua JUta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah). Lokasi kegiatan terpusat di Wilayah Kabupaten Sampang kecuali untuk kegiatan Rapat Koordinasi dan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan diluar daerah. Dari total dana pagu indikatif sebesar Rp. 8.542.133.413,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua JUta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) tersebut seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, inovasi daerah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan. Selanjutnya inovasi yang digagas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/ atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu adalah sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Deskripsi
1	Sistem Informasi Pengawasan (SIP)	Aplikasi yang diperuntukkan bagi APIP untuk memudahkan kinerja APIP secara komprehensif mulai dari penyusunan SPT hingga penyusunan LHP
2	Arsip SPJ Elektronik (ARSI)	Aplikasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang untuk mengelola laporan keuangan berupa SPJ
3	Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT)	Aplikasi online berbasis web yang memudahkan pengguna untuk mengajukan surat permohonan keterangan bebas temuan
4	Whistleblowing System (WBS)	Aplikasi online berbasis web menjamin kerahasiaan pengguna dalam rangka melaporkan tindak pidana korupsi
5	Koordinasi Pengawasan Internal Melalui Obrolan Ringan (KOPI MORNING)	Kegiatan rapat internal yang membahas tentang koordinasi dan kinerja antar irban, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh APIP dalam rangka menjalankan fungsi pe,binaan dan pengawasan

6	Klinik Konsultasi Intensif Aparat Pengawas Intern (KLINIK APIP)	Aplikasi online berbasis web yang memudahkan pengguna untuk melakukan konsultasi online kepada APIP
7	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SI PETJUT)	Aplikasi online yang memudahkan OPD untuk mengunggah file TLHP tepat waktu disertai reminder dan status ketepatan dokumen yang diunggah
8	Sistem Informasi Anti Korupsi (SI AKI)	Aplikasi online berbasis web yang menyajikan data dan informasi infografis mengenai pemahaman tentang korupsi dan gratifikasi pada pengguna

BAB V PENUTUP

Renja Tahun 2023 adalah Renja tahun kelima pelaksanaan program / kegiatan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2024. Renja tahun 2023 tahun kelima Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan memperhatikan target program / kegiatan yang pada tahun – tahun sebelumnya yang belum tercapai dengan tidak meninggalkan program / kegiatan yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah. Namun demikian keterbatasan pagu anggaran menjadi unsur pembatas untuk dapat benar-benar merencanakan program / kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Prosedur standar penyusunan renja mengacu kepada sasaran dalam renstra yang telah ditetapkan dengan target program / kegiatan yang telah direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Dengan demikian penetapan rencana kinerja tahunan berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dikorelasikan dengan renstra dan pelaksanaan program / kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Oleh karena itu permasalahan, tantangan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program / kegiatan menjadi kajian untuk selanjutnya direncanakan upaya tindak lanjut dalam renstra atau renja tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut dari Renja Tahun 2023 secara garis besar meliputi:

- 1) Program / kegiatan yang menjadi isu strategis
- 2) Program / kegiatan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya

Kata kunci dalam setiap perencanaan adalah mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan, mengakomodir isu stretegis serta menjadikan setiap perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan.

Sampang, Agustus 2022
Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19751012 199901 1 002